Ribuan Warga 10 Desa Tolak Relokasi, Pemkab Pasuruan Akan Sampaikan kepada Pemerintah Pusat

Rabu, 4 September 2019

Ribuan warga dari 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling, Kabupaten Pasuruan, melakukan aksi damai di kantor Bupati Pasuruan pada Rabu (4/9/2019). Mereka menolak relokasi dari tanah yang menjadi sengketa dengan TNI AL dan menuding sikap keras dan arogansi TNI AL. Warga membawa keranda putih sebagai tanda penolakan dan menginginkan penyelesaian konflik tanah.

Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron, bertemu dengan perwakilan warga dan menyatakan bahwa Pemkab Pasuruan tidak memiliki wewenang untuk menentukan langkah terkait sengketa lahan dengan TNI AL. Ia akan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) untuk menentukan langkah selanjutnya.

Mujib juga menyatakan bahwa Pemkab Pasuruan akan menyampaikan aspirasi warga kepada Pemerintah Pusat terkait penolakan relokasi. Ia berharap warga dapat beraktivitas seperti biasa sambil menunggu langkah dari Pemerintah Pusat.

Aksi damai ini menuntut penyelesaian konflik tanah dengan TNI AL dan menuntut keadilan bagi warga yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut.

Pertemuan dengan Wakil Bupati Pasuruan menjadi titik awal bagi Pemkab Pasuruan untuk berperan aktif dalam mencari solusi atas konflik lahan ini. Harapannya, upaya mediasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dapat menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.